

Pemprov Kaji Ulang Pergub Pelarangan Plastik

Pergub pelarangan kantong plastik sedang disesuaikan dengan peraturan daerah (perda) lainnya.

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum juga mengesahkan peraturan gubernur (pergub) mengenai pelarangan kantong belanja plastik sekali pakai. Sebelumnya, pergub itu direncanakan akan disahkan pada Januari 2019 ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Isnawa Aji mengatakan, pihaknya masih memenuhi target-target yang diinstruksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, pihaknya juga masih mengoreksi rancangan pergub tersebut.

“Ada target-target yang harus kami selesaikan berkaitan dengan itu, misalnya, harus ada edukasi yang lebih,” ujar Isnawa ditemui *Republika* di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (25/1).

Kepala Seksi Pengolahan Sampah DLH DKI Jakarta, Rahmawati, menjelaskan, pergub pelarangan kantong plastik dalam proses penyesuaian serta sinkronisasi dengan peraturan daerah (perda) lainnya. Ia menyebut, perda yang berkaitan ialah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

“Jadi, arahan Pak Gubernur untuk disesuaikan dengan rancangan pergub yang kami buat. Ada penyesuaian dengan Perda Perpasaran,”

kata Rahmawati.

Ia memaparkan, pihaknya kini tengah mengoreksi rancangan pergub itu. Penyesuaian dengan Perda Perpasaran dilakukan dengan berkonsultasi bersama tim Gubernur. Pasalnya, di dalam pergub pelarangan kantong belanja plastik akan melarang sejumlah pelaku usaha, baik ritel maupun pasar tradisional dan modern.

Dengan demikian, lanjut Rahmawati, dalam pergub tersebut akan dilakukan perubahan tata nama (nomenklatur) menyesuaikan dengan Perda Perpasaran. “Yang jelas salah satunya nomenklatur toko modern menjadi toko swalayan, pasar tradisional menjadi pasar rakyat,” ujar dia.

Ia menambahkan, dalam rancangan pergub pelarangan kantong plastik juga pihaknya akan memasukkan insentif. Maksudnya, insentif yang bisa diterima bagi pelaku usaha ketika mengimplementasikan kebijakan pelarangan kantong plastik itu.

Rahmawati pun tak bisa memastikan waktu penyelesaian koreksi pergub itu. Akan tetapi, DLH berupaya akan segera merampungkan rancangan pergub pelarangan kantong belanja plastik sekali pakai dalam waktu dekat.

Kemudian, pihaknya juga harus menunggu kembali arahan dari Anies. “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama,” tutur dia.

Rahmawati menambahkan, secara garis besar rancangan pergub tersebut tak banyak berubah. Intinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui DLH ingin mengurangi penggunaan kantong plastik

sekali pakai dari pelaku usaha.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat pun akan berhenti menggunakan kantong plastik ketika berbelanja. Ia mengatakan, kini pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. “Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita semua, termasuk media, bisa mengkampanyekan untuk mulai mengurangi sampah plastik dengan membawa tas belanja sendiri,” kata Rahmawati menjelaskan.

Gerakan massal

Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan gerakan massal kesadaran lingkungan. Gerakan ini untuk memfasilitasi antusiasme dan upaya masyarakat menangani pencemaran sampah plastik, baik di darat maupun lautan.

“Kita mengusulkan bersama-sama tim nasional ini merencanakan untuk dinamika masyarakat ini, kita fasilitasi dan kita angkat sekaligus, sebagai gerakan nasional untuk Indonesia Bersih atau untuk Indonesia Bersih dan Sehat itu sedang disiapkan,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Istana Negara Jakarta, Kamis (24/1).

Menurut dia, masyarakat melalui lembaga swadaya, komunitas, dan mitra lingkungan banyak yang turut membantu menjaga kebersihan lingkungan dari sampah plastik, baik di sungai, pesisir pantai, hingga kawasan laut. Terdapat juga kota di Indonesia, yakni Kota Surabaya, yang menerapkan penukaran sampah

plastik dengan tiket bus.

Inisiatif penjagaan kebersihan kota seperti itu, kata dia, baru dilakukan di beberapa kota dunia, antara lain, Surabaya, Sidney, Beijing, dan Ankara. Pemerintah juga akan melakukan penghitungan secara cepat tentang jumlah sampah plastik di lautan dengan melibatkan pemerintah daerah dan Oseanografi.

Sebelumnya, kajian cepat Bank Dunia mencatat kebocoran sampah plastik ke laut mencapai 1,29 juta ton mencemari lautan Indonesia. Hingga 2025, Indonesia menargetkan untuk mengurangi 70 persen sampah plastik di lautan. Salah satu pembeli di sebuah minimarket di Jakarta Pusat, Cindy (22 tahun), mengatakan, ia menyetujui langkah Pemprov DKI melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Ia juga sudah membiasakan membawa tas kantong belanja sendiri.

“Bagus *dong*, itu mengurangi sampah plastik di Jakarta. Mungkin kita harus sering-sering ingat bawa tas belanja sendiri,” ujar Cindy.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak memakai kantong plastik. Untuk barang belanja, yang sedikit, lanjut dia, lebih baik menolak penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Selain itu, berdasarkan pantauan *Republika* di minimarket tersebut, petugas kasir menanyakan terlebih dahulu untuk menggunakan kantong plastik atau tidak. Akan tetapi, masih banyak pembeli yang masih menggunakan kantong plastik meski hanya membeli dua sampai tiga barang.